



**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 400 TAHUN 2024
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS DAFTAR PRODUSEN DATA GEOSPASIAL DAN INFORMASI
GEOSPASIAL TEMATIK LINGKUP KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN PADA LAMPIRAN PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN NOMOR 24 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA
PENYELENGGARAAN INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK LINGKUP
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, perubahan lampiran daftar Informasi Geospasial Tematik ditetapkan dengan Keputusan Menteri;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik oleh Produsen Data Geospasial dan Walidata Geospasial, terdapat perubahan daftar Informasi Geospasial Tematik berupa penambahan, penghapusan, dan perubahan nomenklatur Informasi Geospasial Tematik, serta penambahan informasi skala pada Informasi Geospasial Tematik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Perubahan Atas Daftar Produsen Data Geospasial dan Informasi Geospasial Tematik Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada Lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial;
7. Peraturan Presiden Nomor 27 tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional;
8. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021;
9. Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
10. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.02/Menhut-II/2010 tentang Sistem Informasi Kehutanan;
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan;
13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG PERUBAHAN ATAS DAFTAR PRODUSEN DATA GEOSPASIAL DAN INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK LINGKUP KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PADA LAMPIRAN PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR 24 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK

LINGKUP KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN.

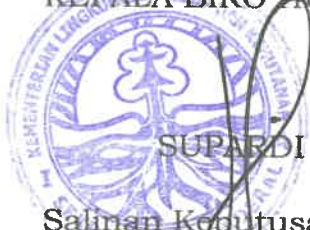
- KESATU : Menetapkan perubahan pada lampiran dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku maka:
- Lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dinyatakan tetap berlaku dan menyesuaikan dengan lampiran Keputusan ini; dan
 - Terhadap pengelolaan Data dan Informasi Geospasial Tematik lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan oleh Produsen Data Geospasial dan Walidata Geospasial yang masih dalam proses maupun telah dilakukan publikasi, penyelenggaraannya menyesuaikan Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 April 2024

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.



SITI NURBAYA

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
3. Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS;
4. Kepala Badan Pusat Statistik;
5. Kepala Badan Informasi Geospasial;
6. Produsen Data Geospasial Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 400 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS DAFTAR PRODUSEN DATA
GEOSPASIAL DAN INFORMASI GEOSPASIAL
TEMATIK LINGKUP KEMENTERIAN LINGKUNGAN
HIDUP DAN KEHUTANAN PADA LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN NOMOR 24 TAHUN 2021 TENTANG
TATA CARA PENYELENGGARAAN INFORMASI
GEOSPASIAL TEMATIK LINGKUP KEMENTERIAN
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

**DAFTAR PRODUSEN DATA GEOSPASIAL DAN DAFTAR INFORMASI
GEOSPASIAL TEMATIK LINGKUP KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN**

NO	PRODUSEN DATA GEOSPASIAL	INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK
I. Bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan		
1.	Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	1. Penutupan Lahan Kawasan Hutan, Skala 1:250.000 2. Penutupan Hutan, Skala 1:250.000 3. Potensi Hutan, Skala 1:250.000 4. Neraca Sumber Daya Hutan (NSDH) Penutupan Lahan, Skala 1:250.000 5. Neraca Sumber Daya Hutan (NSDH) Kawasan Hutan, Skala 1:250.000 6. Peta Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru pada Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut (PIPIB), Skala 1:250.000 7. Deforestasi, Skala 1:250.000 8. Reforestasi, Skala 1:250.000 9. Sebaran Klaster Inventarisasi Hutan Nasional, Skala 1:250.000
2.	Direktorat Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	1. Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN), Skala 1:250.000 2. Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHP dan KPHL), Skala 1:250.000 3. Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK), Skala 1:250.000 4. Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK), Skala 1:50.000

NO	PRODUSEN DATA GEOSPASIAL	INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK
		5. Peta Indikatif dan Areal Perhutanan Sosial (PIAPS), Skala 1:250.000 6. Kawasan Hutan untuk Ketahanan Pangan (KHKP), Skala 1:50.000 7. Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) Operasi Produksi/Non Tambang, Skala 1:50.000 8. Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) Eksplorasi, Skala 1:50.000 9. Persetujuan Kerja Sama Penggunaan Kawasan Hutan, Skala 1:50.000 10. Persetujuan Pelaksanaan Kegiatan Survei Penggunaan Kawasan Hutan, Skala 1:50.000 11. Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK), Skala 1:50.000 12. Penetapan Wilayah Pengelolaan Hutan Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara, Skala 1:50.000
3.	Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	1. Kawasan Hutan, Skala 1:250.000 2. Penetapan Kawasan Hutan, Skala 1:50.000 3. Pelepasan Kawasan Hutan, Skala 1:50.000 4. Peta Indikatif Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam rangka Penataan Kawasan Hutan (PPTPKH), Skala 1:250.000 5. Rekalkulasi Batas Kawasan Hutan, Skala 1:50.000
4.	Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor	1. Ekoregion Darat, Skala 1:250.000 2. Ekoregion Laut, Skala 1:500.000 3. Karakteristik Bentang Alam, Skala 1:250.000 4. Karakteristik Vegetasi Alami, Skala 1:250.000 5. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH), Skala 1:250.000 6. Jasa Lingkungan Hidup terkait Air, Skala 1:250.000 7. Arahan Optimasi Kawasan Hutan berdasarkan Indeks Jasa Lingkungan (IJL), Skala 1:250.000
5.	Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan	1. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), Skala 1:50.000 2. Addendum Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup – Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (ANDAL RKL-RPL), Skala 1:50.000 3. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL), Skala 1:50.000

NO	PRODUSEN DATA GEOSPASIAL	INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK
II. Bidang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem		
6.	Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi	1. Profil Kawasan Konservasi, Skala 1:50.000 2. Zonasi Taman Nasional (TN), Skala 1:50.000 3. Blok Kawasan Konservasi, Skala 1:50.000
7.	Direktorat Pengelolaan Kawasan Konservasi	1. Daerah Penyangga, Skala 1:50.000 2. Kemitraan Konservasi, Skala 1:50.000
8.	Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati Spesies dan Genetik	1. Sebaran Satwa Dilindungi, Skala 1:250.000 2. Perjumpaan Tumbuhan Alam pada Kawasan Konservasi, Skala 1:50.000 3. Konflik Satwa dan Manusia, Skala 1:50.000
9.	Direktorat Bina Pengelolaan dan Pemulihan Ekosistem	1. Kawasan Ekosistem Esensial (KEE), Skala 1:50.000 2. Indikasi Kawasan dengan Nilai Keanekaragaman Hayati Tinggi di luar Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA), dan Taman Buru (TB), Skala 1:50.000 3. Capaian Pemulihan Ekosistem, Skala 1:25.000
10.	Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi	1. Potensi Jasa Lingkungan Air dan Energi Air di Kawasan Konservasi, Skala 1:25.000 2. Penetapan Areal Pemanfaatan Air dan Energi Air di Kawasan Konservasi, Skala 1:25.000 3. Areal Perizinan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air dan Energi Air di Kawasan Konservasi, Skala 1:25.000 4. Pemanfaatan Air dan Energi Air di Kawasan Konservasi, Skala 1:25.000 5. Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi (Areal Kegiatan Eksplorasi/Areal Kegiatan Usaha) di Kawasan Konservasi, Skala 1:50.000 6. Jasa Lingkungan Karbon di Kawasan Konservasi, Skala 1:50.000 7. Desain Tapak Pengelolaan Pariwisata Alam di Kawasan Konservasi, Skala 1:25.000 8. Perizinan Berusaha Pengusahaan Sarana Jasa Lingkungan Wisata Alam di Kawasan Konservasi, Skala 1:25.000
III. Bidang Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan		
11.	Direktorat Perencanaan dan Pengawasan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai	1. Lahan Kritis, Skala 1:50.000 2. Daerah Aliran Sungai (DAS), Skala 1:50.000 3. Rawan Limpasan, Skala 1:50.000 4. Rawan Erosi, Skala 1:50.000 5. Klasifikasi Daerah Aliran Sungai, Skala 1:50.000

NO	PRODUSEN DATA GEOSPASIAL	INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK
		6. Rencana Umum Rehabilitasi Hutan dan Lahan Daerah Aliran Sungai (RURHL-DAS), Skala 1:50.000
12.	Direktorat Konservasi Tanah dan Air	1. Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air, Skala 1:25.000 2. Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai, Skala 1:50.000
13.	Direktorat Perbenihan Tanaman Hutan	1. Zona Benih Tanaman Hutan, Skala 1:250.000 2. Persebaran Persemaian, Skala 1:250.000 3. Persebaran Sumber Benih Tanaman Hutan, Skala 1:250.000
14.	Direktorat Rehabilitasi Hutan	Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Skala 1:10.000
15.	Direktorat Rehabilitasi Perairan Darat dan Mangrove	1. Daerah Tangkapan Air Danau, Skala 1:50.000 2. Mangrove, Skala 1:25.000 3. Mata Air, Skala 1:250.000
IV. Bidang Pengelolaan Hutan Lestari		
16.	Direktorat Bina Rencana Pemanfaatan Hutan	1. Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPHP dan KPHL), Skala 1:50.000 2. Arahana Pemanfaatan Hutan untuk Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan, Skala 1:250.000
17.	Direktorat Bina Usaha Pemanfaatan Hutan	Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH), Skala 1:50.000
18.	Direktorat Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan	1. Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan, Skala 1:50.000 2. Tata Batas Areal Kerja Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan, Skala 1:50.000
19.	Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan	Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan, Skala 1:50.000
V. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan		
20.	Direktorat Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut	1. Fungsi Ekosistem Gambut (FEG), Skala 1:50.000 dan Skala 1:250.000 2. Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG), Skala 1:50.000 dan Skala 1:250.000 3. Status Kerusakan Ekosistem Gambut, Skala 1:250.000
21.	Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut	1. Indeks Kualitas Air Laut, Skala 1:250.000 2. Pemantauan Sampah Laut, Skala 1:250.000
22.	Direktorat Pengendalian Kerusakan Lahan	Indikatif Kerusakan Lahan, Skala 1:250.000
23.	Direktorat Pengendalian Pencemaran Air	Status Mutu Air, Skala 1:250.000

NO	PRODUSEN DATA GEOSPASIAL	INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK
24.	Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara	1. Indeks Kualitas Udara, Skala 1:250.000 2. Beban Emisi, Skala 1:250.000
VI. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Berbahaya dan Beracun		
25.	Direktorat Penanganan Sampah	Sebaran Pengelolaan Sampah, Skala 1:50.000
26.	Direktorat Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun	Pemantauan Merkuri, Skala 1:50.000
VII. Bidang Pengendalian Perubahan Iklim		
27.	Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	1. Sebaran Hotspot, Skala 1:250.000 2. Areal Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla), Skala 1:250.000 3. Rawan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla), Skala 1:250.000
28.	Direktorat Adaptasi Perubahan Iklim	1. Kerentanan Perubahan Iklim, Skala 1:250.000 2. Lokasi Program Kampung Iklim (Proklam), Skala 1:250.000
29.	Direktorat Inventarisasi Gas Rumah Kaca dan Monitoring Pelaporan Verifikasi	1. Wilayah Pengukuran Kinerja REDD+, Skala 1:250.000 2. Cadangan Karbon, Skala 1:250.000
VIII. Bidang Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan		
30.	Direktorat Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial	1. Persetujuan Pengelolaan Hutan Desa (PPHD), Skala 1:50.000 2. Persetujuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (PPHKm), Skala 1:50.000 3. Persetujuan Pengelolaan Hutan Tanaman Rakyat (PPHTR), Skala 1:50.000 4. Persetujuan Kemitraan Kehutanan (PKK), Skala 1:50.000 5. Izin Pengelolaan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS), Skala 1:50.000
31.	Direktorat Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat	1. Penetapan Status Hutan Adat, Skala 1:50.000 2. Penetapan Status Hutan Hak, Skala 1:50.000
IX. Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan		
32.	Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup	1. Sebaran Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup melalui Pengadilan, Skala 1:50.000 2. Sebaran Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan, Skala 1:50.000
X. Bidang Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan		
33.	Sekretariat Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Hutan Penelitian, Skala 1:250.000
34.	Pusat Standardisasi Instrumen Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	Petak Ukur Permanen (PUP), Skala 1:25.000

NO	PRODUSEN DATA GEOSPASIAL	INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK
XI. Indonesia's FOLU Net Sink		
35	Tim Kerja Indonesia's FOLU Net Sink	1. Indeks Prioritas Lokasi (IPL), Skala 1:250.000 2. Tipologi Kelembagaan, Skala 1:250.000 3. Arahana Pelaksanaan Aksi Mitigasi Indonesia FOLU NET Sink 2030, Skala 1:250.000 4. Rencana Kerja Sub Nasional Arahana Pelaksanaan Aksi Mitigasi Indonesia FOLU NET Sink 2030, Skala 1:250.000



MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA